

Framing Media TEMPO dalam Membentuk Opini Publik terhadap Amran Sulaiman pada Isu ‘Poles-Poles Beras Busuk’

Emil Fatra¹, Thiara Tri Funny Manguma²

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Almarisah Madani

²Program Studi Informatika, Universitas Almarisah Madani

e-mail: emil.fatra21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Majalah Tempo membingkai isu “poles-poles beras busuk” melalui pemberitaan dan ilustrasi yang dipublikasikannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing Robert N. Entman yang menitikberatkan pada empat elemen utama, yaitu pendefinisian masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Data penelitian diperoleh dari 18 item pemberitaan Tempo yang membahas isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, Tempo secara konsisten menempatkan persoalan beras sebagai isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pangan nasional, pengawasan distribusi, serta perlindungan konsumen. Kedua, Tempo membangun citra kritis terhadap Menteri Pertanian Amran Sulaiman melalui pemilihan diksi, sudut pandang pemberitaan, dan pengaitan dengan relasi kekuasaan yang dianggap memiliki pengaruh dalam pengelolaan sektor pangan. Ketiga, langkah pelaporan balik dan gugatan hukum yang dilakukan Amran Sulaiman terhadap Tempo dibingkai sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kebebasan pers dan ruang kritik publik. Temuan ini menunjukkan bahwa Tempo tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor media yang secara aktif mengonstruksi realitas sosial melalui proses framing terhadap isu pangan dan relasi kekuasaan di Indonesia.

Kata kunci: *framing media, Tempo, Amran Sulaiman, beras, kebebasan pers*

Abstract

This study aims to analyze how Tempo Magazine framed the issue of “polished rotten rice” through its news coverage and illustrations. The research employed a qualitative approach using Robert N. Entman’s framing analysis, which focuses on four key elements: problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. The data consisted of 18 Tempo news articles discussing the issue. The findings reveal three main patterns. First, Tempo consistently positioned the rice controversy as a strategic issue closely related to national food governance, distribution

oversight, and consumer protection. Second, Tempo constructed a critical image of Minister of Agriculture Amran Sulaiman through its choice of language, news angles, and associations with power relations believed to influence the management of the food sector. Third, Amran Sulaiman's legal complaints and lawsuits against Tempo were framed as actions that could potentially exert pressure on press freedom and restrict public criticism. These findings suggest that Tempo functions not only as a provider of information but also as a media actor actively constructing social reality through its framing of food policy issues and power relations in Indonesia.

Keywords: *Media Framing, Food Governance, Tempo Magazine, Amran Sulaiman, Press Freedom*

LATAR BELAKANG

Media massa memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman dan opini publik terhadap suatu isu, terutama ketika isu tersebut berkaitan dengan tokoh publik dan kebijakan pemerintah. (Fatra et al., 2023) Sebagai salah satu media investigatif paling berpengaruh di Indonesia, *Tempo* dikenal memiliki gaya peliputan yang kritis, mendalam, dan sering menjadi rujukan dalam pembentukan persepsi publik terhadap isu-isu nasional. Karena itu, cara *Tempo* mengemas dan membingkai (framing) suatu berita sangat menentukan bagaimana masyarakat memahami dan menilai peristiwa yang diberitakan. (Kerins et al., 2023)

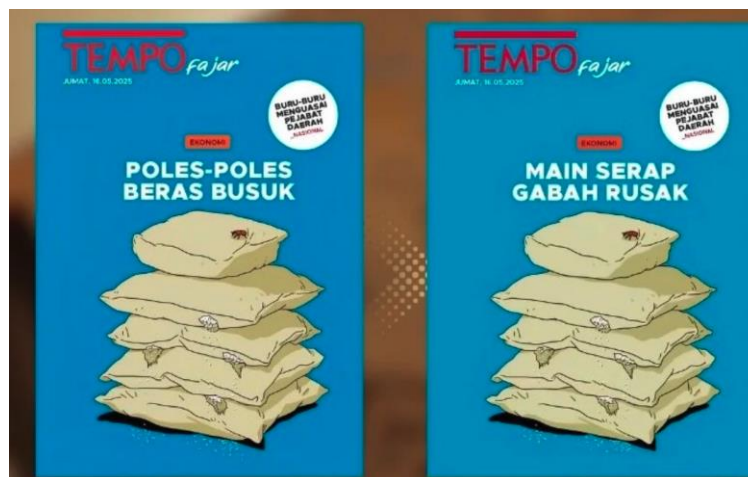
Salah satu isu yang menimbulkan perhatian publik adalah polemik “poles-poles beras busuk” yang menyeret nama Amran Sulaiman sebagai tokoh yang dikaitkan dengan dinamika industri beras di Indonesia. Isu ini bukan hanya menyangkut kualitas produk pangan, tetapi juga menyentuh aspek politik, ekonomi, serta reputasi personal. Dalam konteks komunikasi media, bagaimana pemberitaan dikonstruksi oleh media akan memengaruhi bagaimana publik memaknai peran dan citra seorang tokoh di balik isu tersebut. Gaya visual *Tempo*, termasuk penggunaan ilustrasi dan symbol seperti yang tampak pada sampul majalah yang menampilkan representasi figur dengan ekspresi karikatural juga berfungsi sebagai bentuk framing visual yang dapat memperkuat narasi tertentu. (Arioputro et al., n.d.) Kombinasi antara teks berita, sudut pandang liputan, pilihan narasumber, hingga penggunaan simbol visual, semuanya bekerja sebagai elemen framing yang mengarahkan audiens pada interpretasi tertentu. (Indiahono & Satyawan, 2023) Ketegangan muncul dalam relasi antara *Tempo* dan Amran Sulaiman ketika media tersebut menampilkan pemberitaan yang dinilai memberikan kesan negatif terhadap dirinya. Salah satu laporan yang dirilis *Tempo* berjudul “*Risiko Bulog Setelah Cetak Rekor Cadangan Beras Sepanjang Masa.*” Namun, yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya isi berita tersebut, melainkan ilustrasi sampul majalah *Tempo* yang menampilkan visualisasi “poles-poles beras busuk.”



Gambar : Ilustrasi Majalah Tempo

Sumber : <https://tagar.co/menteri-pertanian-menggugat/>

Ketidaksesuaian antara judul berita dengan ilustrasi sampul dinilai menimbulkan interpretasi berbeda di kalangan publik. (Ina Hamung Putri et al., 2025) Visualisasi tersebut dianggap terlalu berlebihan dan menimbulkan kesan seolah-olah terdapat tindakan manipulatif dalam penanganan beras. Ilustrasi majalah tempo pada kasus gambar diatas menimbulkan multitafsir yang berlebihan. (Ahdiyat, n.d.) Akibatnya, opini publik berkembang secara cepat, termasuk reaksi yang datang langsung dari Menteri Pertanian saat itu, Amran Sulaiman, yang merasa bahwa pemberitaan tersebut berpotensi membentuk citra negatif terhadap dirinya. (Salsabila Frisa Maulida et al., 2025) Walaupun pada tanggal 16 mei 2025 Tempo telah merubah ilustrasi majalahnya yang semula poles-oles beras busuk menjadi main serap gabah rusak.



Gambar 2. Tampilan sampul Tempo sebelum dan sesudah revisi.

Sumber : <https://www.tempo.co/ekonomi/kualitas-cadangan-beras-berlimpah-1444575>

Perubahan model dan bahasa pemberitaan yang dilakukan oleh Tempo akhirnya menjadi sorotan karena dinilai melanggar ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik dan pedoman Dewan Pers. Meskipun pelanggaran etik seperti ini bukan hal baru dalam dunia pers, kasus Tempo berkembang menjadi isu yang luas karena melibatkan media arus utama serta berkaitan dengan seorang pejabat negara yang memiliki pengaruh besar. Sorotan publik yang begitu kuat menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis dan menuntut standar profesionalisme yang lebih tinggi dari institusi media.

Fenomena ini juga menegaskan bahwa pelanggaran kode etik masih menjadi persoalan yang kerap muncul dalam praktik jurnalistik di Indonesia. (Shafa Qurbani & Yuningsih, 2026) Merespons hal tersebut, berbagai kalangan mulai dari akademisi, praktisi media, hingga organisasi masyarakat memberikan peringatan agar perusahaan pers lebih berhati-hati dan lebih efektif dalam menyajikan informasi kepada publik. Setiap informasi yang disampaikan membutuhkan proses verifikasi yang ketat, penyuntingan yang lebih cermat, serta penggunaan bahasa yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau merugikan pihak tertentu. Melalui pendekatan framing, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana Tempo mengonstruksi isu “poles-poles beras busuk” serta bagaimana konstruksi tersebut berperan dalam membentuk opini publik terhadap Amran Sulaiman. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengurai proses seleksi, penonjolan, dan penafsiran elemen-elemen informasi yang digunakan Tempo dalam memberitakan isu tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah isi pemberitaan, tetapi juga menelusuri strategi naratif yang digunakan media dalam membangun makna tertentu di benak khalayak.

Analisis framing menjadi relevan karena media memiliki kapasitas yang signifikan dalam memengaruhi persepsi masyarakat. Cara Tempo memilih sudut pandang, menentukan fokus masalah, serta menyajikan tokoh tertentu dalam narasi pemberitaan berpotensi membentuk citra, reputasi, bahkan legitimasi seorang pejabat publik. Dalam konteks kasus ini, konstruksi pemberitaan dapat memengaruhi bagaimana publik memahami tindakan, kebijakan, maupun integritas Amran Sulaiman sebagai tokoh yang menjadi sorotan.

Selain memberikan gambaran mengenai dinamika kekuasaan simbolik media dalam memengaruhi opini publik, penelitian ini juga memperkaya kajian komunikasi media dengan menggarisbawahi fungsi framing sebagai alat pembentukan realitas sosial di ruang publik. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga turut menciptakan skema pemaknaan yang menentukan bagaimana suatu isu dipersepsikan, diperdebatkan, dan dimaknai oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas mengenai peran media sebagai aktor yang tidak netral dalam proses produksi wacana publik serta implikasinya terhadap kehidupan demokrasi dan relasi antara media dan kekuasaan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing untuk memahami bagaimana Tempo mengonstruksi pemberitaan mengenai Amran Sulaiman dalam isu “poles-poles beras busuk.” Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, representasi, dan strategi pemberitaan yang kompleks serta konteks sosial kultural yang melingkupi produksi berita. Kerangka analitis penelitian mengacu pada model framing Robert Entman yang memandang framing sebagai penonjolan aspek tertentu dari realitas untuk mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan menyarankan solusi.(Sri Nurhayati, 2023) Model ini digunakan untuk menelaah bagaimana elemen-elemen teks berita dan elemen visual seperti ilustrasi sampul berfungsi menuntun pembaca pada interpretasi tertentu terhadap isu dan tokoh yang diberitakan.(Abdussamad et al., 2024)

Sumber data utama penelitian terdiri atas artikel berita, laporan utama, dan sampul majalah Tempo yang membahas isu beras serta keterkaitan Amran Sulaiman dengan isu tersebut. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan arsip digital Tempo selama rentang waktu yang relevan dengan munculnya polemik tersebut. Seleksi sampel dilakukan purposif: peneliti memilih item pemberitaan yang paling representatif dan memiliki relevansi langsung dengan narasi “poles-poles beras busuk.”

Teknik pengumpulan data meliputi pengunduhan (download) dan pengarsipan teks berita serta pengambilan gambar sampul yang berkaitan. Setiap item diberi kode identifikasi dan dicatat metadata penting seperti tanggal terbit, penulis, rubrik, dan posisi publikasi untuk membantu kontekstualisasi analisis. Data tambahan berupa pernyataan resmi, tanggapan publik di media sosial yang representatif, atau pernyataan pihak terkait dapat digunakan sebagai bahan triangulasi bila relevan.

Proses analisis dimulai dengan pembacaan mendalam terhadap seluruh teks dan analisis isi visual. Peneliti mengidentifikasi unit analisis berupa frase, paragraf, tajuk, pilihan narasumber, dan elemen visual yang menonjol. Selanjutnya unit-unit tersebut diklasifikasikan berdasarkan empat fungsi framing Entman: penentuan masalah, diagnosis penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan. Interpretasi diarahkan pada pola penonjolan isu, strategi naratif, relasi antara teks dan gambar, serta implikasi terhadap pembentukan opini publik.(Fathan Mubina & Dwi Prananda, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pemberitaan yang dilakukan tempo setelah digugat oleh Amran sulaiman semakin memperjelas bahwa saat ini tempo telah memframing amran sulaiman untuk membentuk opini public. Didalam kakian penelitian telah ditemukan 18 item pemberitaan Tempo yang relevan dengan isu beras dan keterkaitan Amran Sulaiman selama periode penelitian mengungkap pola framing yang konsisten. Pertama, terdapat penonjolan masalah kualitas cadangan beras sebagai isu utama. Dalam banyak teks, masalah dikonstruksi melalui pemilihan kata-kata yang menekankan risiko dan ketidaksesuaian kualitas, sehingga pembaca diarahkan untuk

melihat masalah sebagai ancaman terhadap ketahanan pangan. Kedua, terkait diagnosis penyebab, pemberitaan cenderung menempatkan fokus pada faktor institusional seperti manajemen Bulog, proses penyimpanan, dan praktik distribusi, namun pada sejumlah artikel tertentu narasi juga mengaitkan masalah dengan praktik-produk di tingkat produksi dan tata kelola yang melibatkan aktor-aktor kebijakan.

A. Mengangkat isu beras menjadi persoalan publik yang penting dan mendesak.

Mengangkat isu beras menjadi persoalan publik yang penting dan mendesak berarti menjadikan masalah tersebut bukan sekadar persoalan teknis atau administratif, tetapi sebuah isu yang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Ketika media seperti Tempo menempatkan isu beras dalam ruang pemberitaan utama, ia mendorong publik untuk melihatnya sebagai masalah yang memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan sehari-hari, stabilitas ekonomi, dan kepercayaan terhadap institusi pengelola pangan. Dengan penonjolan tertentu, isu beras diposisikan sebagai problem yang harus segera ditangani karena berkaitan dengan kebutuhan pokok, distribusi pangan, serta potensi manipulasi yang dapat merugikan masyarakat.



Gambar 3. Berita Tempo

Berita online yang diliris 16 mei 2025 adalah awal dari perseteruan yang terjadi antara kedua belah pihak. Padahal isi beritanya hanya menyampaikan bahwa bulog dalam hal ini lembaga yang mengelola beras di Indonesia telah memiliki cadangan beras sebanyak 3,7 ton. Namun secara substansi pemberitaan Tempo tersebut justru menimbulkan persoalan baru melalui gambar ilustrasinya. Melalui cara ini, Tempo tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga membangun persepsi bahwa persoalan beras merupakan

bagian dari isu strategis nasional yang perlu dikritisi. Pemberitaan yang intens, penggunaan diksi yang kuat, dan visualisasi yang menarik menjadikan isu tersebut memperoleh perhatian publik yang besar. Akibatnya, masyarakat terdorong untuk mendiskusikan, mempertanyakan, dan mengevaluasi bagaimana pemerintah, lembaga terkait, maupun tokoh yang terlibat menangani persoalan tersebut. Dengan demikian, pengangkatan isu beras sebagai masalah penting dan mendesak menunjukkan bagaimana media berperan aktif dalam membentuk prioritas publik serta mengarahkan fokus masyarakat pada isu yang dianggap memiliki dampak luas.

B. Membentuk Citra Kritis Terhadap Amran Sulaiman

Tempo tidak hanya menyajikan fakta, tetapi merangkai informasi dengan sudut pandang yang menempatkan Amran Sulaiman sebagai figur publik yang patut dipertanyakan kebijakan dan konsistensinya. Melalui pilihan diksi yang tegas serta penonjolan aspek-aspek yang memicu perdebatan publik, Tempo membangun sebuah konstruksi naratif yang menekankan adanya potensi ketidakteraturan dalam tata kelola pangan. Fakta-fakta yang dihadirkan tidak berdiri sendiri, melainkan dipadukan dengan interpretasi yang mengarahkan pembaca untuk melihat adanya kemungkinan celah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terkait isu beras.

Konstruksi naratif ini diperkuat melalui cara Tempo menggarisbawahi ketidaksesuaian antara pernyataan resmi pemerintah dan situasi faktual di lapangan. Setiap kali Tempo menyoroti kerumitan persoalan atau ketidakjelasan langkah pemerintah, perhatian pembaca diarahkan pada posisi strategis Amran Sulaiman dalam proses tersebut. Dengan menekankan unsur-unsur ketegangan antara wacana resmi dan realitas sosial, Tempo semakin memperkuat kesan bahwa sosok Amran merupakan aktor penting yang kebijakannya perlu dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Melalui pola pemberitaan seperti itu, citra yang terbentuk bukan sekadar tokoh yang tengah terlibat dalam isu pangan, tetapi seseorang yang kepemimpinan dan kebijakannya layak mendapatkan pengawasan dan kritik mendalam. Tempo tidak hanya membingkai Amran sebagai bagian dari dinamika isu, tetapi sebagai figur yang memiliki tanggung jawab moral dan administratif terhadap kekacauan informasi dan problematika di seputar isu “poles-poles beras busuk.” Dengan demikian, framing yang dibangun menghadirkan persepsi bahwa peran Amran Sulaiman tidak bisa dilepaskan dari sorotan publik serta evaluasi kritis terhadap kinerjanya.

Dalam beberapa pemberitaannya, Tempo tampak secara sengaja mengarahkan pembaca untuk melihat sisi lain dari Amran Sulaiman melalui pemilihan isu dan sudut pemberitaan yang memperkuat konstruksi citra tertentu. Salah satu contoh yang menonjol adalah ketika Tempo mengangkat berita tentang hubungan kekerabatan dan jejaring politik antara Amran dan Haji Isam. Fokus pada relasi personal ini tidak hanya menggeser perhatian publik dari isu teknis mengenai perberasan, tetapi juga memperluas ruang tafsir bahwa posisi Amran dalam struktur kekuasaan tidak berdiri sendiri, melainkan bertumpu pada jaringan sosial politik yang lebih luas.

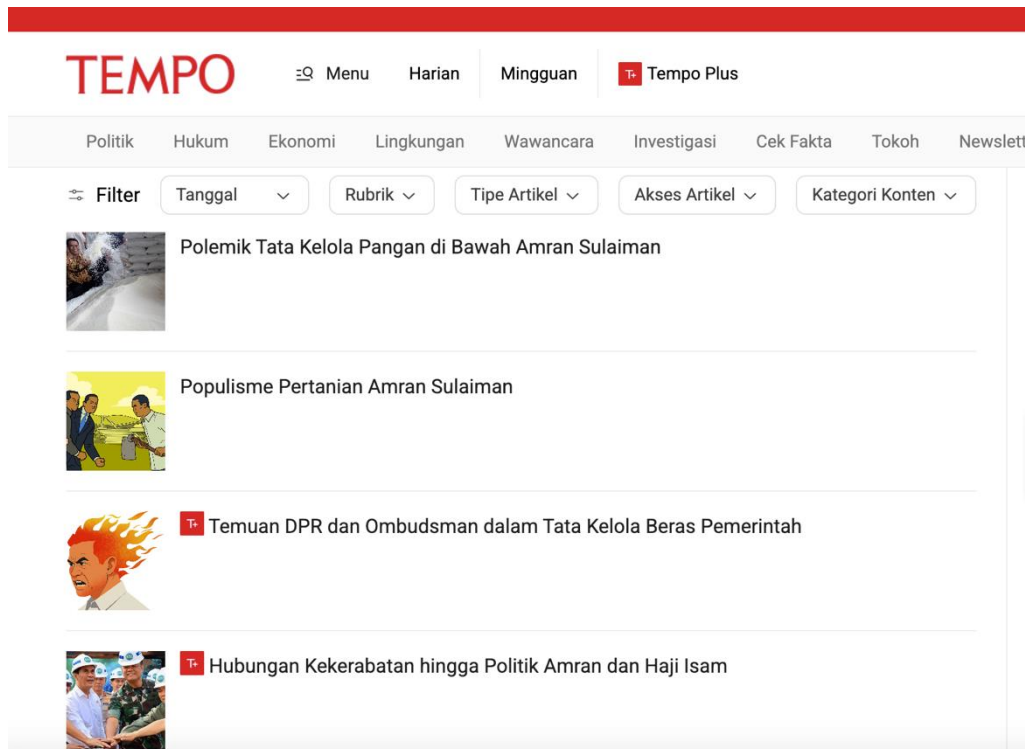
Tempo juga merilis pemberitaan mengenai sosok Bupati Bone, Asman Sulaiman, yang diposisikan sebagai adik dari Menteri Pertanian dan abang Gubernur Sulawesi Selatan. Penyajian informasi mengenai hubungan keluarga ini berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa dinamika politik dan birokrasi di daerah tersebut berada dalam satu lingkaran kekuasaan yang saling menopang. Dengan menyoroti dimensi kekerabatan, Tempo sebenarnya tidak hanya menyampaikan fakta genealogis, tetapi juga menyisipkan kritik tersirat mengenai potensi konsolidasi kekuasaan dalam lingkup keluarga, yang pada akhirnya dapat memunculkan dugaan bias kebijakan, konflik kepentingan, atau preferensi politik tertentu.

Dari sudut analisis framing, pemberitaan semacam ini memperlihatkan bagaimana Tempo tidak sekadar melaporkan informasi, tetapi turut membentuk kerangka interpretasi yang membuat pembaca melihat isu Amran Sulaiman dalam konteks yang lebih luas dan problematis. Penonjolan jejaring keluarga dan afiliasi politik tersebut kemudian menghasilkan narasi bahwa otoritas dan keputusan Amran tidak hanya dilandasi kapasitas profesional, tetapi juga ditopang oleh relasi personal yang patut dipertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya. Strategi framing ini menunjukkan kecenderungan media untuk memperkuat wacana kritis terhadap posisi dan legitimasi seorang pejabat publik melalui pengaitan isu multidimensi yang tampak terhubung secara politik maupun struktural.



Gambar 4. Pemberitaan Tempo

Sumber : <https://www.tempo.co/politik/sosok-bupati-bone-asman-sulaiman-adik-menteri-pertanian-dan-abang-gubernur-sulawesi-selatan-2061574>



Gambar 5. Portal susunan berita Tempo

Sumber : <https://www.tempo.co/tag/amran-sulaiman?page=7>

Pendekatan ini mendorong pembaca untuk tidak berhenti pada pemahaman permukaan mengenai isu beras, tetapi ikut menempatkan Amran Sulaiman dalam konteks yang lebih luas sebagai aktor yang terlibat dalam dinamika politik pangan. Melalui konstruksi naratif yang sistematis, Tempo tidak hanya menyajikan fakta, tetapi membangun alur berpikir yang mengarahkan pembaca untuk menilai bahwa setiap keputusan dan kebijakan Amran memiliki konsekuensi politik, ekonomi, dan sosial yang perlu dikaji secara kritis.

Framing yang dilakukan Tempo menempatkan Amran sebagai tokoh yang tidak sekadar terseret isu, tetapi memiliki posisi strategis yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi tindakan. Dengan menonjolkan celah kebijakan, ketidakselarasan data, dan potensi konflik kepentingan, Tempo mendorong publik untuk melihat bahwa persoalan beras bukan hanya soal teknis pengelolaan cadangan pangan, tetapi juga menyangkut integritas dan kepemimpinan seorang pejabat negara. Melalui pemberitaan yang memperlihatkan elemen-elemen kontroversial, Tempo memposisikan dirinya sebagai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara aktif.

Penekanannya tidak hanya pada fakta-fakta yang sudah diketahui publik, tetapi juga pada aspek-aspek tersembunyi yang dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan di sektor pangan. Dengan cara ini, Tempo menunjukkan bahwa media memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang diskusi kritis dan menuntut akuntabilitas pejabat publik yang bekerja di sektor strategis. Pendekatan analitis seperti ini pada akhirnya memperkuat persepsi publik bahwa isu beras adalah persoalan kompleks yang menuntut perhatian serius, dan bahwa Amran Sulaiman merupakan aktor penting yang harus mampu menjelaskan peran serta kebijakannya secara terang dan meyakinkan.

Penelitian ini menemukan bahwa Tempo membangun konstruksi yang khas terkait isu poles-oles beras busuk melalui strategi framing yang tampak konsisten antara sampul, judul, isi laporan, hingga pilihan diksi yang digunakan. Representasi yang dibangun tidak sekadar menempatkan persoalan beras sebagai isu teknis mengenai kualitas pangan, tetapi mengangkatnya menjadi persoalan moral, integritas pejabat publik, dan ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah. Melalui konstruksi tersebut, Tempo membentuk cara pembaca memahami posisi Amran Sulaiman sebagai tokoh publik yang memiliki kedekatan dengan isu ini. Dalam pendefinisian masalah, Tempo menggambarkan persoalan beras sebagai isu besar yang menyangkut manipulasi, kelangkaan, dan kekacauan tata kelola pangan. Sampul majalah menampilkan ilustrasi bernuansa gelap dan satir sehingga memperkuat kesan bahwa kasus ini sarat dengan ketidakwajaran dan persoalan moral. Tempo membingkai persoalan beras sebagai bentuk ketidaktransparanan dalam pengelolaan komoditas pangan nasional, yang memunculkan keraguan publik terhadap integritas dan akuntabilitas pejabat yang bertanggung jawab.

Melalui narasi investigatifnya, Tempo juga mendorong pembaca untuk melihat adanya aktor atau kebijakan tertentu yang berperan dalam munculnya kekacauan beras. Fokus diarahkan pada kebijakan kementerian, proses distribusi beras, dan dugaan manipulasi kualitas yang dikenal dengan istilah pemolesan beras. Walaupun Tempo tidak menyebutkan individu secara langsung sebagai pelaku, penempatan tokoh Amran Sulaiman dalam alur laporan membuatnya terasosiasi sebagai bagian dari lingkaran penyebab. Dengan demikian, Tempo membangun pemahaman bahwa kepemimpinan dan kebijakan yang diambil sang tokoh memiliki kontribusi terhadap persoalan yang terjadi. Pada tataran penilaian moral, pilihan judul, metafora, serta ilustrasi yang digunakan menghadirkan kesan bahwa praktik pemolesan beras merupakan tindakan yang tidak pantas dan merugikan masyarakat. Tempo menekankan bahwa pemolesan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan isu integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Narasi satir yang disajikan menegaskan bahwa pejabat publik yang bertanggung jawab seharusnya mampu mencegah atau minimal menertibkan kondisi tersebut.

Melalui saran penanganan yang dibangun secara implisit, Tempo mengarahkan pembaca untuk melihat perlunya transparansi dalam kebijakan pangan, pengawasan ketat terhadap kualitas beras, serta evaluasi terhadap pejabat atau kebijakan yang dianggap berkontribusi pada kekacauan tersebut. Meskipun tidak menawarkan solusi teknis secara spesifik, Tempo menyampaikan pesan kuat mengenai pentingnya

akuntabilitas pejabat publik, termasuk Amran Sulaiman sebagai bagian dari struktur pengambil keputusan dalam sistem pangan nasional.

C. Amran Sulaiman melaporkan Tempo dan dianggap membungkam pers

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Amran Sulaiman yang melaporkan Tempo menimbulkan respons publik yang cukup besar, terutama berkaitan dengan persepsi mengenai kebebasan pers dan ruang kritik terhadap pejabat publik. Langkah pelaporan tersebut dipandang bukan semata sebagai upaya klarifikasi atau pembelaan diri, tetapi juga sebagai tindakan yang berpotensi membatasi ruang kritik media. Dalam konteks demokrasi, ketika seorang pejabat publik memilih jalur hukum untuk menanggapi pemberitaan investigatif, muncul pertanyaan apakah laporan tersebut merupakan bentuk keberatan yang objektif terhadap fakta yang dinilai keliru, atau justru strategi defensif untuk meredam kritik dan mengendalikan narasi.

Tindakan melaporkan media seperti Tempo, yang selama ini dikenal dengan jurnalisme investigatif yang kritis, menciptakan kesan bahwa terdapat ketegangan antara kepentingan pemerintah dan fungsi kontrol sosial media. Banyak kalangan menilai bahwa langkah tersebut dapat mengarah pada delegitimasi kerja jurnalistik, sebab investigasi dan kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peran pers dalam mengawasi kekuasaan. Ketika seorang pejabat publik menggunakan instrumen hukum untuk merespons kritik, hal itu sering dianggap sebagai upaya melemahkan independensi media dan mengintimidasi jurnalis agar lebih berhati-hati atau bahkan enggan mengungkap problem struktural.

Framing yang terbentuk kemudian memperlihatkan dinamika kuasa, di mana Amran Sulaiman sebagai representasi institusi negara berada pada posisi dominan, sementara Tempo tampil sebagai pihak yang mempertahankan ruang kebebasan berekspresi. Publik melihat bahwa ketegangan tersebut tidak hanya mencerminkan konflik personal atau sengketa pemberitaan, tetapi mencerminkan isu yang lebih luas tentang bagaimana pejabat publik merespon kritik dan apakah negara benar-benar memberikan jaminan terhadap kebebasan pers. Dalam narasi tersebut, pelaporan terhadap Tempo akhirnya membentuk opini bahwa ada potensi pembungkaman suara kritis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langkah tersebut dapat dipahami sebagai pesan simbolik bahwa kritik terhadap pemerintah dapat berujung pada konsekuensi hukum. Hal ini tentu memiliki dampak jangka panjang terhadap ekosistem pemberitaan, termasuk potensi lahirnya self-censorship di kalangan media lain. Dengan demikian, tindakan Amran Sulaiman melaporkan Tempo tidak hanya dipahami sebagai sengketa hukum, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika relasi kuasa antara pejabat publik dan institusi media, serta sebagai indikator bagaimana kebebasan pers diuji dalam konteks isu beras dan tata kelola pangan nasional.

Hukum

Jurnalis di Makassar yang Demo Menteri Amran Sulaiman Dipukul Orang Tidak Dikenal

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar Didit Hariyadi mengungkapkan, demo tersebut sempat diwarnai aksi kekerasan.

5 November 2025 | 14.10 WIB

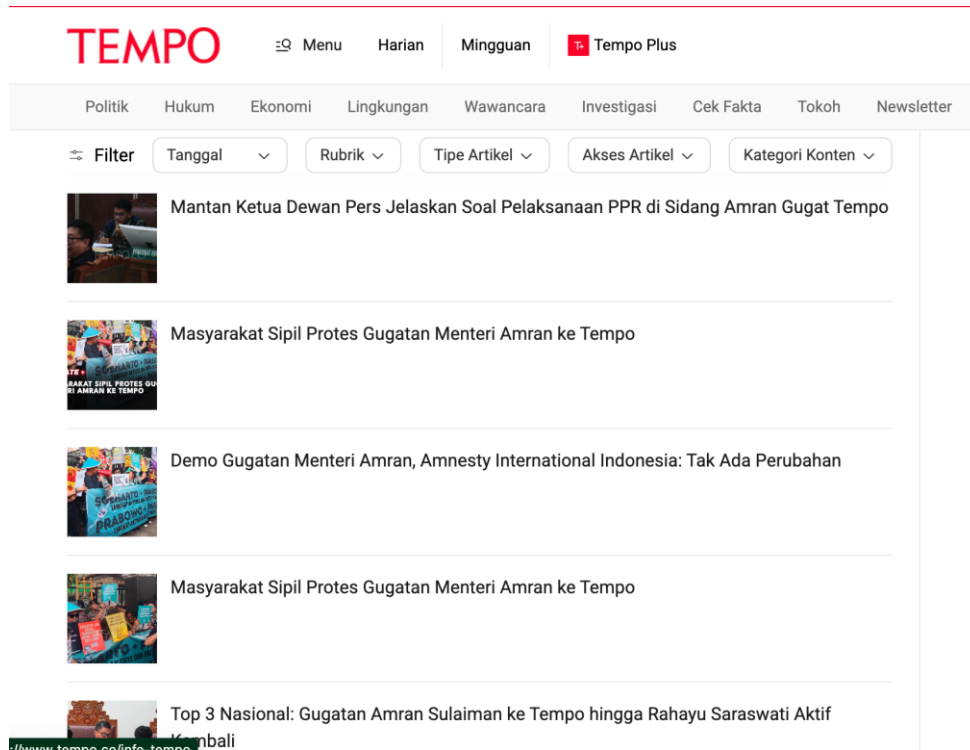


Gambar 6. Pemberitaan Tempo

Sumber : <https://www.tempo.co/hukum/jurnalis-di-makassar-yang-demo-menteri-amran-sulaiman-dipukul-orang-tidak-dikenal-2086622>

Pelaporan yang dilakukan Amran Sulaiman terhadap Tempo dengan tuntutan sebesar 200 miliar rupiah memicu gelombang reaksi dari berbagai kalangan jurnalis di Indonesia. Banyak jurnalis dan organisasi pers menilai langkah tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap kebebasan pers. Menurut mereka, upaya memproses media secara hukum tanpa melalui mekanisme keberatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers sama saja dengan membungkam kebenaran dan mengancam independensi pemberitaan. Framing mengenai kondisi pers pun kembali mengemuka. Kasus ini dianggap sebagai cerminan bahwa pers di Indonesia masih menghadapi tekanan yang signifikan, baik secara politik maupun ekonomi. Beberapa pihak menyatakan bahwa ruang gerak pers semakin tercekik dan dibatasi, sehingga membuat jurnalis tidak leluasa dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya. (Gina Aulia Nurpadilah; Siti Nafisa Nura Syabanahar, 2025)

Di ruang publik, respons masyarakat pun beragam. Ada yang mendukung langkah Amran Sulaiman dengan alasan perlunya menjaga reputasi individu atau institusi dari pemberitaan yang dianggap merugikan. Namun, tidak sedikit pula yang menilai bahwa tindakan tersebut merupakan upaya mempersempit ruang demokrasi dan menghambat kerja-kerja jurnalistik. Perdebatan ini menegaskan bahwa isu mengenai kebebasan pers tetap menjadi topik sensitif dan krusial dalam dinamika demokrasi Indonesia.



Gambar 7. Struktur dan daftar pemberitaan yang dipublish Tempo

Sumber : <https://www.tempo.co/tag/amran-sulaiman?page=3>

Gambar di atas memperlihatkan framing yang dilakukan Tempo setelah digugat dan dituntut oleh Amran Sulaiman sebesar 200 miliar rupiah. Pemberitaan yang disajikan Tempo dari sudut pandang redaksi tampak membuka babak baru dalam perseteruan tersebut. Alih-alih meredam ketegangan, publik justru melihat adanya eskalasi narasi yang mempertegas posisi masing-masing pihak. Padahal, jika ditinjau dari perspektif komunikasi, konflik seperti ini sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog terbuka atau mekanisme klarifikasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pers. Penyelesaian non-litigasi semacam ini sering dianggap lebih konstruktif, karena memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai titik temu tanpa menimbulkan kegaduhan publik yang berkepanjangan.

Namun, dinamika yang terjadi justru menunjukkan pergeseran opini publik. Banyak masyarakat yang mulai menafsirkan kasus ini bukan sekadar sengketa pemberitaan, tetapi sebagai bagian dari problem yang lebih besar mengenai kebebasan pers di Indonesia. Tempo merespons tekanan tersebut dengan melakukan serangan balik melalui pemberitaan yang menyoroti sisi lain dari situasi jurnalisme nasional, terutama mengenai bagaimana pers kerap berhadapan dengan upaya pembungkaman, intimidasi, dan risiko kriminalisasi. Framing ini memperkuat persepsi bahwa tuntutan

terhadap media tidak hanya berdampak pada satu institusi, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi dunia pers.

Dengan demikian, konflik antara Amran Sulaiman dan Tempo tidak hanya menjadi isu legal atau personal, tetapi berkembang menjadi simbol pertarungan antara kebebasan ekspresi dan tekanan terhadap jurnalisme. Publik pun terbelah antara mereka yang melihat gugatan tersebut sebagai langkah wajar untuk menjaga kehormatan, dan mereka yang menganggapnya sebagai ancaman terhadap ruang demokrasi serta independensi media.

Pembahasan :

Perdebatan mengenai perlindungan terhadap pers kembali mencuat ke permukaan. Dalam sistem hukum yang ideal, ketika sebuah pihak merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, langkah yang paling tepat dan konstitusional adalah menyampaikan keberatan melalui mekanisme hukum yang tersedia, baik melalui hak jawab, hak koreksi, maupun proses pengadilan apabila dinilai terjadi pelanggaran serius. Mekanisme ini bukan hanya memberikan kepastian hukum bagi pihak yang keberatan, tetapi juga menjaga integritas kerja jurnalistik itu sendiri.

Namun, dalam kasus ini Tempo melalui berbagai rilis beritanya terlihat memilih berlindung pada narasi kebebasan pers. Sikap tersebut memberi kesan bahwa setiap bentuk kritik atau keberatan terhadap pemberitaannya dianggap sebagai ancaman terhadap independensi media. Padahal, kebebasan pers bukanlah hak absolut yang berdiri tanpa batas; kebebasan itu tetap terikat pada prinsip-prinsip profesionalisme, akurasi, keberimbangan, serta etika jurnalistik yang menjadi fondasi kepercayaan publik. Ketika sebuah media mengabaikan prinsip ini, kritik yang muncul tidak dapat serta-merta dipandang sebagai upaya membungkam pers. Sebaliknya, kritik dapat menjadi bagian dari mekanisme sosial untuk menjaga agar pers tetap berada pada jalur yang benar.

Dinamika kasus ini juga memantik perhatian berbagai organisasi internasional, termasuk IFEX International Freedom of Expression, yang mendesak Presiden Prabowo agar meminta Amran Sulaiman mencabut laporan dan gugatan terhadap Tempo. Desakan tersebut bertolak dari kekhawatiran bahwa tindakan hukum dapat disalahartikan sebagai bentuk tekanan terhadap media. Namun, jika kedua belah pihak meyakini posisi dan kebenaran masing-masing, ruang yang paling transparan, adil, dan terukur justru adalah proses persidangan. Di dalamnya, bukti dapat diuji, argumentasi dapat disampaikan secara setara, dan publik dapat mengawasi prosesnya secara langsung. Dengan demikian, penyelesaian melalui jalur hukum bukan saja tidak mengancam kebebasan pers, tetapi justru berpotensi memperkuatnya, sejauh dijalankan dengan prinsip keadilan dan bebas dari intervensi. Proses hukum yang terbuka menjadi wadah klarifikasi yang dapat mencegah kesimpangsiuran dan mempertegas batas antara kritik yang sah dan praktik jurnalistik yang keliru. Pada akhirnya, keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan pers dapat terwujud tanpa mengorbankan salah satu pihak, sekaligus

memberikan pembelajaran penting tentang konsistensi penerapan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia.

Penulis memandang bahwa kasus pelaporan terhadap media Tempo menjadi momentum penting bagi seluruh insan pers di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menjadi pengingat bahwa pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menegaskan bahwa setiap pemberitaan harus bertumpu pada data yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik jurnalistik yang tidak berbasis pada verifikasi yang kuat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, merugikan pihak tertentu, dan pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap media. Dalam konteks ini, kasus tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa kebebasan pers harus berjalan berdampingan dengan tanggung jawab etik. Kode Etik Jurnalistik dan pedoman yang ditetapkan Dewan Pers tidak sekadar formalitas, tetapi merupakan standar profesional untuk memastikan bahwa media bekerja secara objektif, proporsional, dan tidak menyesatkan masyarakat. Ketika media berpegang teguh pada prinsip tersebut, publik akan mendapatkan kejelasan informasi, sementara potensi konflik atau kerugian bagi pihak yang diberitakan dapat diminimalisir.

Lebih jauh, peristiwa ini menegaskan pentingnya membangun budaya editorial yang lebih berhati-hati, teliti, dan terbuka terhadap koreksi. Dengan memahami batas-batas etika sekaligus menjaga kebebasan pers, media dapat menjalankan fungsinya sebagai pilar demokrasi tanpa mengabaikan hak-hak individu maupun kelompok yang terdampak oleh pemberitaan. Pada akhirnya, kasus ini memperkuat kesadaran bahwa keakuratan informasi bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga fondasi utama bagi keberlangsungan pers yang dipercaya publik.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tempo membentuk konstruksi realitas yang kuat melalui strategi framing dalam pemberitaannya terkait isu beras dan figur Amran Sulaiman. Dari 18 berita yang dianalisis, Tempo secara konsisten menonjolkan masalah kualitas beras dan ketidakjelasan tata kelola pangan sehingga isu ini dipahami publik sebagai persoalan nasional yang mendesak. Framing Tempo juga membangun citra kritis terhadap Amran Sulaiman dengan mengaitkannya pada persoalan kebijakan, jejaring kekuasaan, dan potensi konflik kepentingan. Melalui pilihan diksi, visual, dan sudut pemberitaan, Amran diposisikan sebagai pejabat publik yang kebijakannya layak dikritisi. Pelaporan balik Amran terhadap Tempo kemudian memperkuat perdebatan publik mengenai kebebasan pers. Tindakan tersebut dipersepsikan sebagai upaya yang berpotensi membatasi kritik media dan membungkam suara jurnalis. Konflik ini berkembang menjadi simbol tarik-menarik antara kekuasaan negara dan independensi pers di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Si, M., Sopingi, I., Hi, S., Sy, M., Setiawan, B., Sibua, M. S. N., & Pd, S. (2024). *Buku Referensi Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mixed Methode*.
- Ahdiyat, A. N. (n.d.). Analisis Semiotika Visual Pada Ilustrasi Sampul Majalah Tempo Edisi "Jerat Kedua." In *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* (Vol. 12). Retrieved <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>
- Arioputro, S., Nugroho, A., Studi, P. S., & Komunikasi, I. (n.d.). *FRAMING MEDIA TEMPO.CO TERHADAP BERITA MENGENAI PEMBANGUNAN IKN*.
- Fathan Mubina, F., & Dwi Prananda, A. (2024). Analisis Framing Robert N. Entman Teks Editorial Judi Onlilne di Media Online (mediaindonesia.com). *Desember*, 709–715. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1193>
- Fatra, E., Tri, T., & Manguma, F. (2023). *Framing Analysis of Metro TV News (Case Study: President Joko Widodo's Neutrality in the 2024-2029 Presidential Candidate Election in Indonesia)*. <https://publikasi.abidan.org/index.php/komunika/index>
- Gina Aulia Nurpadilah; Siti Nafisa Nura Syabanahar; (2025). *Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Kebebasan Pers(Study Kasus : Penganiayaan Jurnalis Tempo, Nurhadi)*.
- Ina Hamung Putri, Dewi Astuti, & Sri Muryati. (2025). Interpretasi Kesalahan Diksi Pada Berita Harian Online Akurat Jateng Edisi 12 November 2024. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa*, 3(1), 417–427. <https://doi.org/10.59024/bhinneka.v3i1.1275>
- Indiahono, D., & Satyawan, D. S. (2023). Perspectives of Online News Media on Extreme Poverty and Regional Budget Policy Response. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 3(2), 81–90. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.3.2.81-90>
- Kerins, C., Furey, S., Kerrigan, P., McCartan, A., Kelly, C., & Vaughan, E. (2023). News media framing of food poverty and insecurity in high-income countries: A rapid review. *Health Promotion International*, 38(6). <https://doi.org/10.1093/heapro/daad188>
- Salsabila Frisa Maulida, Parlaungan Gabriel Siahaan, Novridah Reanti Purba, Alza Ayunda, Deny Tri Ramadhandy, Chrislyn Novyanti, Tasya Dwitama, & Widya Anggraini Lumban Tobing. (2025). *peran media massa dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat studi kasus : (pemberitaan fenomena #kaburajadulu dampaknya terhadap dan tuntutan perubahan sosial-ekonomi di fakultas ekonomi kelas b pendidikan administrasi perkantoran t.a 2024)*.
- Shafa Qurbani, F., & Yuningsih, H. (2026). *Tindak Pidana dalam Praktik Jurnalistik: Batas Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum*. 5, 207–214.
- Sri Nurhayati, E. (2023). Analisis Framing Model Entman pada Pemberitaan Kebocoran Data Aplikasi Pedulilindungi oleh Media Online. *ANUVA*, 7(4), 573–590.

